

ISBN . 979 9924 662

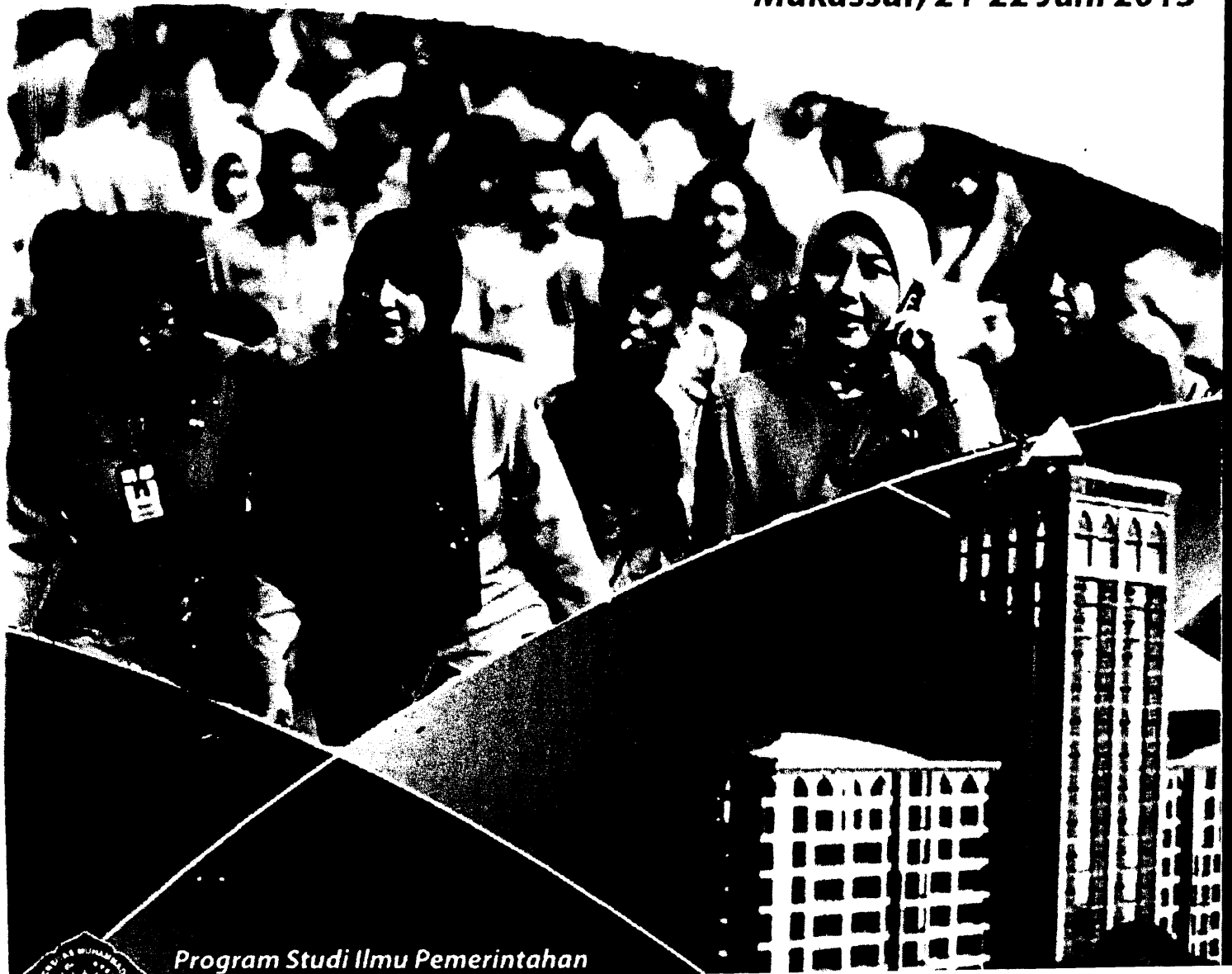


**ASOSIASI ILMU PEMERINTAHAN
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH**

***Prosiding
Seminar Nasional***

**MENYONGSONG PEMILU 2014 :
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI & POLITIK
INDONESIA BERKEMAJUAN**

Makassar, 21-22 Juni 2013



Program Studi Ilmu Pemerintahan

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT karena proses penyusunan proceeding ini telah selesai dilakukan. Berbagai tulisan mengenai proses reformasi birokrasi dan politik untuk menuju pada Indonesia yang berkemajuan tercantum dalam proceeding ini. Sebuah sumbangan pemikiran dari para akademisi dan mahasiswa yang dikoordinasi dalam AIPPTM (Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah) diharapkan akan membawa perubahan bagi Indonesia. Proses reformasi birokrasi memang menjadi bagian penting untuk menuju perubahan ke arah yang jauh lebih baik lagi.

Hal ini sangat logis mengingat birokrasi sebagai mesin organisasi pemerintah mempunyai fungsi yang signifikan dalam mengimplementasikan kebijakan. Sukses atau tidaknya sebuah kebijakan salah satunya dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi. Demikian juga dengan wilayah politik, sebuah proses reformasi politik diharapkan akan menghasilkan politisi yang mampu melakukan formulasi kebijakan dengan baik, sehingga dihasilkan sebuah kebijakan yang memang bersumber dari kepentingan masyarakat.

Atas dasar pemikiran seperti itulah maka AIPPTM melalui anggotanya mencoba memberikan sumbangan pemikiran mengenai reformasi birokrasi dan reformasi politik sebagai salah jalan untuk menuju pada Indonesia yang semakin baik. Berbagai tulisan mengenai reformasi birokrasi yang terdapat dalam proceeding ini membahas mengenai permasalahan – permasalahan yang ada dalam birokrasi, peran birokrasi di aras lokal, pemekaran daerah, etika birokrasi serta adanya konflik di tingkat lokal. Sedangkan kajian reformasi politik banyak dibahas mengenai peran partai politik di tingkat lokal ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kajian politik lainnya membahas tentang demokrasi serta pemilihan umum yang merupakan sarana demokrasi untuk proses pergantian kepemimpinan. Semoga gagasan dan pemikiran dari anggota AIPPTM terkait dengan reformasi birokrasi dan reformasi politik yang ada dalam proceeding ini membawa perubahan yang signifikan untuk Indonesia.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Ketua AIPPTM

Dr. Achmad Nurmandi, MSc

DAFTAR ISI

Judul dan Penulis	Halaman
Reformasi Birokrasi Dalam Pusaran Oligarki Kekuasaan Politik Lokal Di Kab. Takalar Prov. Sulawesi Selatan -Andi Luhur Prianto-	1
Pemekaran Daerah Dan Kinerja Birokrasi Daerah Evaluasi Kinerja Daerah Otonom Di Provinsi Riau -Achmad Nurmandi-	16
Lembaga Ombudsman Daerah, Best Practices Pelayanan Pengaduan Di Daerah Istimewa Yogyakarta -Ane Permatasari-	39
Urgensi Transformasi Partai Politik Menuju Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Demokratis -Awang Darumurti-	57
Fenomena Demokrasi Elitis Di Indonesia -Gonda Yumitro-	72
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Suatu Analisa Terhadap Perspektif Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Barat) -H. M. Ali- -Iwan Tanjung Sutarna-	84
One Men One Vote Versus One Delegation One Vote (Analisis Tentang Kemacetan Sistem Pemilihan Ketua Umum Dalam Muktamar Pemuda Muhammadiyah Ke Xiv Tahun 2010) -Jainuri-	92
Pelembagaan Partai Politik Di Tingkat Lokal (Studi Tentang Pelembagaan Partai Golkar Di Kabupaten Sinjai Pasca Kekalahan Pada Pemilu 2009) -Muhammad Lutfi-	116
Pola Relasi Komunitas Adat Karampuang Dengan Pemerintah Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai -Mochamat Nurdin-	137
Etika Birokrat Pada Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap (Sintap) Di Kota Parepare (Studi Kasus Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan) -Muchlas M. Tahir-	146

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bos Di Kecamatan Minasatene Kab Pangkajene Dan Kepulauan -Muhammad Ahsan Samad-	156
Relasi Negara Dan Masyarakat Sipil Dalam Penyusunan Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 Kota Malang Di Era Demokrasi -Salahudin-	164
Faktor Penyebab Dan Dampak Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2004-2013 -Utah Aulia Ulumuddin- -Suswanta-	186
Kepijakan Publik Deliberatif Dan Partisipasi Publik Di Era Demokrasi -Tri Sulistyaningsih-	204
Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Perjanjian Antara Pemerintah Dengan Pihak Ketiga -Umar Congge-	218
Local Governance Reform Reformasi Pengelolaan Pariwisata Dengan Model Collaborative Governance Budget Dan Pengelolaan Urusan Pariwisata Di Kabupaten Sleman -Muhammad Zaenuri-	238
Politik Rantai, Etnisitas Dan Konflik Terhadap Pemerintahan Daerah Pemekatan Kasus Maluku Utara -Zuly Qodir-	256

keseji
seman
penye
reform
pelen

tentan
Bugal
birokr

perizi
Kuati
orien
publik
pelay
berup

Kata

A. P

demi
patok
masih
keber
kepin
Resid
smp

URGENSI TRANSFORMASI PARTAI POLITIK MENUJU PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN DEMOKRATIS

Awang Darumurti
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Proses transformasi partai politik membawa dampak yang sangat signifikan terhadap tata kelola pemerintahan. Kader kader partai politik akan menjadi aktor yang menjalankan manajemen pemerintahan. Oleh karena itu proses transformasi partai politik mutlak untuk segera dilakukan agar partai politik menciptakan kader – kader yang berkualitas dan mempunyai kapasiatas untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Proses transformasi partai politik dapat dimulai dari beberapa aspek, diantaranya adalah struktural dan kultural. Proses transformasi kultural dan stuktural tersebut akan membawa pengaruh yang besar terhadap pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Transformasi, Partai Politik, Akuntabel dan demokratis

Pendahuluan

12 Partai politik yang lolos verifikasi administrasi dan faktual KPU akan bertarung pada pemilihan umum tahun 2014 mendatang. Pertanyaannya kemudian adalah apakah dari 12 partai politik tersebut telah menunjukkan diri sebagai partai yang modern dan mampu menjadi menjadi motor penggerak proses demokratisasi di Indonesia? Teori demokrasi mengatakan bahwa partai politik mempunyai peran yang signifikan dalam proses demokrasi baik prosedural maupun substansial. Fungsi dan peran utama partai politik dalam artikulasi dan agregasi kepentingan, sosialisasi politik, komunikasi politik, formulasi agenda membawa pengaruh dalam proses demokrasi secara substansial. Sedangkan peran dalam seleksi kandidat, mobilisasi dalam pemilihan umum memberi pengaruh dalam proses demokrasi secara prosedural. Dengan melihat signifikansi peran dan fungsi partai politik tersebut dapat dikatakan bahwa partai politik menjadi salah satu aspek penting dalam pendalaman proses demokratisasi.

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia seharusnya mempunyai partai politik yang kuat dalam fungsi dan perannya serta mengakar baik kepada konstituennya ataupun masyarakat secara luas. Didukung dengan sistem multi partai yang dipakai di Indonesia, banyaknya partai politik diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan demokrasi di Indoensia. Ketika fungsi dan peran partai politik dapat berjalan dengan maksimal, maka Indonesia tidak hanya menjadi negara demokrasi terbesar dalam konteks kuantitas penduduknya saja, akan tetapi juga akan mengarah pada negara demokrasi terbesar dengan konteks

substansi. Dengan demikian proses pendalaman dan konsolidasi demokrasi dapat tercapai dengan baik. Celakanya, fakta mengenai fungsi dan peran partai politik berbalik dengan konsep ideal partai politik dalam teori demokrasi.

Sistem oligarki dalam kekuasaan internal partai politik, tidak berjalannya fungsi pendidikan politik, tidak tersalurkannya kepentingan konstituen dan masyarakat luas, tidak transparannya pengelolaan keuangan serta proses seleksi kandidat yang tidak fair adalah beberapa fakta yang menunjukkan bagaimana sebagian besar partai politik di Indonesia belum siap untuk menjadi salah satu penggerak proses demokrasi di Indonesia. Mimpi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar masih terbentur oleh kelemahan partai politik ini.

Reformasi tentang kepartaian seringkali menjadi agenda mendesak yang harus dilakukan oleh semua partai di Indonesia yang dianggap tidak bisa menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Namun pertanyaan selanjutnya adalah apakah reformasi saja telah cukup untuk merombak ataupun merubah secara signifikan wajah partai politik di Indonesia yang terlanjur terstigma buruk di mata masyarakat? Terkadang reformasi yang dilakukan, baik itu secara internal ataupun ada dukungan reformasi eksternal tidaklah cukup untuk merubah secara signifikan wajah partai politik ini. Proses demokrasi internal yang dilakukan oleh partai Golkar misalnya, dianggap sebagai salah satu reformasi partai politik di Indonesia.

Dengan mengadakan konvensi untuk memilih calon presiden dari partai tersebut, Partai Golkar mengklaim sebagai partai yang sudah mengalami perubahan signifikan. Namun pada akhirnya proses demokrasi internal itu tidak berjalan lama dan cenderung kembali pada sistem oligarki partai. Reformasi yang dilakukan oleh partai politik tidak berjalan sempurna dan cenderung berhenti di tengah jalan. Reformasi kepemimpinan yang dilakukan oleh PKB dan PAN beberapa tahun yang juga belum menunjukkan sebuah proses perubahan yang signifikan. Tokoh muda yang dipilih menjadi ketua partai dianggap sebagai salah satu lompatan besar perubahan partai politik di Indonesia. Namun setelah dianalisa lebih lanjut, ternyata perubahan itu diwarnai aroma oligarki sesepuh partai dengan terpilihnya tokoh muda yang mendapatkan restu Ketua Dewan Syuro ataupun ketua penasehat partai. Ironisnya pada perjalanan selanjutnya, praktek oligarki di tubuh PKB membuat partai tersebut mengalami polemik kekuasaan yang berkepanjangan hingga saat ini. Melihat fakta-fakta bahwa reformasi yang dilakukan partai politik ini hanya setengah hati dan tidak membawa perubahan, maka kemudian muncul ide baru untuk melakukan perubahan partai politik di Indonesia. Satu solusi yang muncul kemudian adalah melakukan transformasi partai politik untuk melanjutkan agenda reformasi yang mungkin telah dilakukan oleh beberapa partai politik di Indonesia namun belum memberikan hasil yang maksimal bagi perubahan partai politik di Indonesia.

Transformasi tidak hanya melakukan perbaikan sistem ataupun bagian-bagian dan aspek dari partai politik yang rusak kemudian diperbaiki. Jika hanya sampai tahap itu saja maka dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut baru melangkah pada tahapan reformasi partai politik. Transformasi dilakukan untuk mendeskonstruksi ulang partai politik yang rusak kemudian dibangun yang baru. Tampaknya agenda transformasi

lebih tepat untuk dijalankan di Indonesia dan bukan hanya agenda reformasi saja. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa reformasi partai politik yang dilakukan di Indonesia masih banyak yang jalan di tempat. Jika agenda transformasi partai politik bisa dilakukan, maka perlu juga diperhatikan aspek lainnya yang mendesak untuk dilakukan transformasi. Kajian ini mencoba memberikan analisa secara komprehensif mengenai urgensi transformasi partai politik dalam memberi pengaruh terhadap perkembangan demokrasi dan pemerintahan yang akuntabel serta berlangsung secara demokratis.

Fungsi dan peran partai politik

Mayoritas teori liberal melihat bahwa partai politik mempunyai fungsi dan peran yang esensial dalam praktek demokrasi representatif. Schattschneider mengatakan bahwa praktek demokrasi modern yang melibatkan banyak masyarakat tidak akan bekerja tanpa adanya partai politik. Organisasi ini bisa mempunyai banyak peran yang luas diantaranya adalah melakukan kampanye dalam pemilihan umum, memobilisasi dan mengkoordinasi pendukung, agregasi kepentingan, menstrukturisasi pilihan-pilihan dalam pemilu, menghubungkan antara pemimpin dengan aktivis, menseleksi kandidat, menyusun platform kebijakan, mengorganisasi legislasi, mengkoordinasi formasi dan aktivitas pemerintahan.⁶ Bartoli dan Mair menyarankan bahwa daftar panjang peran partai politik ini dapat direduksi menjadi lima fungsi dan peran kunci partai politik, diantaranya adalah mengintegrasikan dan memobilisasi warga masyarakat, mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan, memformulasi kebijakan publik, rekrutmen pemimpin politik, organisasi parlemen dan pemerintahan. Riswandha Imawan dengan bahasa yang sedikit berbeda mengatakan bahwa fungsi partai politik diantaranya adalah pendidikan politik, ciptakan iklim serta perekat integrasi nasional, menyerap dan menghimpun serta menyalurkan aspirasi masyarakat, sarana partisipasi politik warga negara, rekrutmen politik.⁷

Kapasitas partai politik dalam melaksanakan fungsi-fungsi ini secara efektif masih dikontrol oleh faktor internal dan faktor eksternal. Hukum yang dibuat oleh pemerintah tentang partai politik serta aturan internal partai politik merupakan salah satu faktor yang menentukan kapasitas partai politik dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Pertanyaannya adalah bagaimana sebuah partai politik dapat berperanan dengan baik dalam melaksanakan fungsi-fungsinya? terutama bagi partai politik yang eksis dengan anggota "akar rumput" yang terasing, organisasi yang lemah, dan krisis kepercayaan masyarakat. Perlu diingat bahwa terdapat variasi di dalam peran, fungsi, struktur organisasi, dan filosofi diantara partai politik. Sebagai contoh adalah perbedaan antara struktur *bottom up* partai massa dengan struktur *top down* kaukus-kader. Perbedaan berdasarkan besar kecilnya partai politik di legislatif. Ataupun perbedaan variasi berdasarkan peran yang melekat pada partai tersebut, misalnya antara partai pemerintah dengan oposisi.

6 Pippa Norris, *Building political parties: Reforming legal regulation and internal rules*, Harvard University Cambridge 2005

7 Riswandha Imawan, Diktat kuliah sistem kepartaian dan pemilu 2002.

Meskipun begitu akan menjadi sebuah kesalahan apabila menganggap bahwa variasi penting ini dihubungkan secara sistematis dengan tipe rezim politik seperti perbedaan-perbedaan dalam partai politik yang ditemukan di negara non demokrasi, transisional, konsolidasi, demokrasi yang telah mapan. Level dari sebuah demokratisasi dihubungkan dengan bentuk kompetisi pemilihan umum dan sistem kepartaian yang ada di dalam setiap negara, tingkat institusionalisasi partai politik.

Dari fungsi yang dimiliki oleh partai politik tersebut dapat dinilai apakah sebuah partai politik layak atau harus dilakukan transformasi mengingat peran dan fungsinya yang dinilai tidak efektif bagi berlangsungnya demokrasi serta terwujudnya aspirasi dari masyarakat. Tidak berfungsinya peran-peran yang dimiliki oleh partai politik merupakan indikasi perlu dilakukannya transformasi partai politik. Fungsi pendidikan politik misalnya, jika fungsi ini tidak berjalan berarti partai politik tidak memberikan pengetahuan yang cukup mengenai proses demokrasi substansial, masyarakat hanya mengerti mengenai pelaksanaan demokrasi prosedural. Padahal jika dilihat lebih dalam lagi, demokrasi substantif mempunyai makna yang sangat penting bagi perkembangan pendalaman demokrasi di Indonesia.

Ketika masyarakat hanya mengetahui serta berperan dalam pemilu tetapi dalam menentukan pilihan wakil rakyatnya tidak berdasarkan visi misi calon, kapabilitas, akuntabilitas, serta berbagai elemen penting lainnya dan hanya menentukan pilihan berdasarkan popularitas atau kesenangan saja maka dapat dikatakan bahwa partai politik tidak berhasil dalam melakukan pendidikan politik khususnya terhadap konstituen ataupun masyarakat secara luas. Demikian juga dengan pelaksanaan fungsi partai yang lainnya, misalnya menghimpun, menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Aspirasi dari masyarakat merupakan indikator apakah masyarakat mempunyai akses ke partai politik atau hanya sekedar dijadikan sumber suara oleh partai politik untuk memperoleh kekuasaan. Jika aspirasi hanya diterima atau ditampung saja, maka rakyat tidak mempunyai akses yang baik di dalam partai politik, namun sebaliknya jika partai politik mampu menghimpun, menyerap dan akhirnya menyalurkan aspirasi masyarakat dan terwujud dengan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat maka partai politik dapat dikatakan berhasil melaksanakan salah satu fungsinya. Untuk itulah jika partai politik tidak bisa menjalankan fungsi ini, maka kondisi seperti ini adalah sinyal untuk melakukan transformasi partai politik. Satu atau dua fungsi partai politik yang tidak berjalan saja sudah merupakan indikasi untuk dilakukan transformasi partai politik, apalagi jika banyak fungsi partai politik tidak dilakukan.

Relasi partai politik dengan pemerintahan dan proses demokratisasi

Partai politik yang mempunyai fungsi dan peran signifikan tidak bisa dilepaskan dengan proses demokrasi dan jalannya pemerintahan yang juga mungkin didukung oleh salah satu partai politik. Perbedaan peran yang melekat pada partai politik akan menghasilkan partai pendukung pemerintah ataupun partai yang menjadi oposisi. Dari sini dapat dilihat dengan jelas bahwa partai politik mempunyai peran yang cukup penting apabila dihubungkan dengan jalannya pemerintahan. Melalui

proses pemilihan umum, partai politik memberikan kader-kader yang dianggap terbaik untuk menjadi pemimpin pemerintahan jika memang partai tersebut berhasil memenangkan kompetisi dalam memperebutkan kursi eksekutif. Setelah berhasil menduduki kursi eksekutif, maka menjadi tugas dari kader partai tersebut untuk melaksanakan tugasnya dan menjalankan manajemen pemerintahan dengan baik.

Demikian juga dengan fungsi partai politik yang berhubungan dengan proses demokrasi. Partai politik mempunyai relasi erat dengan proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia. Tanpa partai politik demokrasi tidak akan berjalan. Fungsi-fungsi semacam rekrutmen kader, mobilisasi warga merupakan salah satu fungsi partai politik yang berhubungan dengan proses demokrasi prosedural, dalam hal ini adalah pemilihan umum. Ketika pemilihan umum telah dilakukan dan menghasilkan wakil-wakil rakyat di legislatif, partai politik mempunyai fungsi untuk mendukung ataupun menyusun formulasi kebijakan melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif. Dalam konteks ini partai politik memainkan peran untuk menjalankan demokrasi substantif.

Demikian juga dengan sistem kepartaian yang mempunyai hubungan relatif erat dengan keberlangsungan demokrasi dan pemerintahan yang akuntabel dan demokratis. Untuk menilai apakah sistem kepartaian bisa men *support* proses demokrasi baik secara prosedural ataupun substantif, terdapat beberapa parameter yang bisa digunakan untuk menilai kinerja sistem kepartaian tersebut.

Parameter yang digunakan diantaranya adalah: Seberapa bebaskah partai politik dapat membentuk, merekrut kader dan berkampanye; Seberapa efektif sistem kepartaian membentuk dan mempertahankan pemerintahan; Seberapa bebas oposisi ataupun partai non pendukung pemerintah untuk mengorganisasi serta berperan didalam proses legislasi dan berkontribusi terhadap pemerintah yang akuntabel; seberapa fair dan efektif aturan-aturan mengenai partai politik, pada tingkatan apa partai politik bisa efektif serta seberapa jauh anggota bisa mempengaruhi kebijakan partai dan seleksi kandidat; pada tingkatan apa saja partai politik dapat melintasi arena etnisitas, agama dan bahasa; alat atau prosedur apa, jika ada, yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan publik dan pada tingkatan apa mereka mempunyai prioritas politik dan dukungan publik.⁸

8 IDEA, *Democracy Assesment: The basics of the internasional assesment framework*, 2002

Parameter sistem kepartaian

Parameter	Fair/ya	Tidak
Partai bebas membentuk, merekrut kader, kampanye		
Sistem kepartaian efektif membentuk dan memertahankan pemerintahan		
Oposisi bisa mengontrol jalannya pemerintahan		
Aturan mengenai partai politik fair		
anggota partai bisa berperan dan mempengaruhi kebijakan partai		
partai bisa melintasi arena etnisitas, agama, bahasa		

Sumber: IDEA Internasional

Itulah beberapa parameter yang bisa digunakan untuk menilai apakah sistem kepartaian mendukung terhadap jalannya demokrasi. Dalam diagram telah dipaparkan beberapa parameter yang bisa digunakan untuk menilai apakah sistem kepartain mendukung proses demokrasi yang sedang berjalan. Semakin banyak jawaban Ya/fair maka dapat dikatakan bahwa sistem kepartaian yang dipakai mendukung proses demokrasi. Parameter sistem kepartaian tersebut kemudian dihubungkan dengan parameter berjalannya demokrasi yang dalam hal ini adalah demokrasi substantif. Jika terdapat korelasi yang positif maka sistem kepartaian yang dipakai sudah cocok dengan perkembangan demokrasi di sebuah negara

Pengalaman pada pemilu tahun 2004 dan 2009 menunjukkan bahwa para pemilih, yang dalam hal ini adalah masyarakat, sudah mulai meninggalkan partai tradisonal, eksklusif, serta tidak begitu mempersoalkan figur pemimpin yang kharismatik. Tren pergeseran pemilihan partai politik oleh warga masyarakat mulai bergeser kepada partai politik yang inklusif, menawarkan program yang rasional serta partai-partai politik yang mempunyai ciri-ciri menuju partai modern. Meskipun memang masih ada masyarakat yang fanatik dengan partai tradisional dan pemimpin kharismatik. Tren menuju pemilihan partai politik yang didasarkan atas ciri-ciri partai modern, inklusif serta programnya rasional merupakan peluang bagi partai politik untuk melakukan transformasi mulai dari sekarang, mengingat tren bergerak ke arah itu. Mengapa harus mulai melakukan transformasi mulai dari sekarang?

Transformasi yang dimulai dari detik ini akan membawa perubahan yang besar bagi partai politik itu sendiri. Paling tidak ketakutan akan ditinggalkan konstituennya dapat dikurangi apabila partai tersebut mengikuti pola perbaikan yang sangat konstruktif ini. Efek selanjutnya dari proses transformasi partai politik ini adalah terciptanya sebuah tatanan sistem demokrasi yang lebih mapan, maju dan efektif

mengingat partai politik yang mendukung bangunan demokrasi ini telah mengalami perubahan yang sangat signifikan.

Bagaimana kemudian dengan nasib masyarakat? apakah transformasi yang dilakukan oleh partai politik membawa dampak yang signifikan? Tentu saja efek domino akan berlangsung dalam proses transformasi ini. Partai politik yang melakukan transformasi akan lebih memperhatikan masyarakat sebagai basis konstituennya dikarenakan perubahan cara pandang partai politik itu. Ketika partai politik berubah dan kader-kader partai yang mempunyai kapasitas baik mulai terjun dalam lembaga eksekutif ataupun legislatif maka mimpi menjadi bangsa yang lebih sejahtera mulai terbuka peluangnya.

Sistem kepartaian juga mendukung terciptanya sebuah tatanan demokrasi. Jika salah memakai sistem kepartaian maka inti dari demokrasi tidak bisa tercapai dengan maksimal. Oleh karena itu transformasi sistem kepartaian juga memberikan manfaat bagi perkembangan demokrasi di Indonesia dengan manfaat lebih jauh lagi adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera. Tidak berlebihan jika agenda transformasi sistem kepartaian ini mendesak untuk segera dilakukan mengingat manfaat yang akan didapatkan sangatlah besar.

dampak positif

Berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dari melakukan transformasi, terdapat juga dampak positif yang akan diperoleh jika transformasi berhasil dilakukan dengan baik. Terciptanya partai politik yang modern memberikan dampak positif dengan meningkatnya kedewasaan politik masyarakat Indonesia. Dengan berjalannya fungsi dan peran partai politik, terciptanya demokrasi internal partai, serta berjalannya sistem demokrasi akan menghasilkan rakyat Indonesia yang lebih dewasa dalam berpolitik mengingat ada ketergantungan yang cukup erat antara kedewasaan masyarakat dengan performa partai politik.

Sistem kepartaian yang lebih efektif pada akhirnya akan menciptakan pemerintahan yang stabil, sistem demokrasi yang kuat, serta terciptanya para pembuat keputusan yang relatif lebih baik dari sistem kepartaian yang hanya menguntungkan partai-partai politik besar saja. Ketika semua efek positif ini bisa terjadi pada akhirnya tujuan mencapai masyarakat Indonesia sejahtera tinggal menunggu waktu saja.

Darimana transformasi mulai dilakukan?

Perdebatan yang terjadi selama ini adalah mengenai mulai dari mana transformasi ini dilakukan. Di satu sisi banyak pihak yang mengatakan bahwa transformasi sebaiknya dilakukan dari faktor eksternal terlebih dahulu, misalnya memperbaiki UU partai politik, hukum dan sanksi bagi partai politik, serta penciptaan sistem kompetisi yang memaksa partai politik untuk berbenah dan bersaing memperebutkan konstituen. Ketika faktor-faktor eksternal tersebut dapat dijalankan dengan baik maka dengan sendirinya partai politik akan melakukan transformasi.

Di sisi yang lain, banyak pihak juga berpendapat bahwa transformasi partai politik haruslah dimulai dari dalam partai itu sendiri. Faktor-faktor seperti ideologi, manajemen organisasi, manajemen keuangan, SDM, adalah beberapa elemen internal

partai politik yang perlu dilakukan transformasi ketika semuanya berubah menjadi buruk. Kemauan dari diri sendiri akan menjadi faktor penting untuk melakukan transformasi. Dengan kata lain transformasi yang dimulai dari dalam partai politik akan menghasilkan sebuah partai yang modern dan ideal tanpa perlu terpengaruh dengan kondisi eksternal yang mungkin belum baik.

Jika dilihat dari kedua argumen tersebut, maka transformasi dari dalam partai politik menjadi pilihan yang lebih baik. Alasannya adalah ketika partai politik berubah dan melakukan transformasi menjadi partai modern, partai politik tidak perlu bersusah payah mencari konstituan, karena konstituen yang akan mencari partai politik terbaik. Alasan lainnya adalah meskipun faktor-faktor eksternal telah dilakukan transformasi, namun partai politik tidak mempunyai keinginan untuk berubah maka tetap saja tidak terjadi perubahan untuk menjadi lebih baik. Tujuan transformasi tidak akan tercapai jika partai politik tidak juga melakukan perubahan. Untuk itulah pilihan melakukan transformasi yang dimulai dari dalam partai politik terlebih dahulu menjadi pilihan terbaik untuk melakukan transformasi agar tujuan bisa tercapai dengan baik.

Siapa aktor yang bisa berperan dalam transformasi ini?

Ketika transformasi mulai dilakukan dari internal partai politik, maka aktor yang paling berperan adalah pengurus partai politik yang kemudian didukung oleh anggota partai politik. Pertanyaannya adalah siapa saja pengurus yang berkompoten melakukan transformasi untuk pertama kalinya? Ketika pertanyaan ini diajukan maka jawaban yang mungkin untuk diberikan adalah pengurus partai yang mempunyai visi misi ke depan yang relatif baik dan masih muda. Muda dalam hal ini bukan saja berkaitan dengan umur *sich*. Muda bukan berarti tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan transformasi dengan baik. Pilihan terhadap pengurus partai yang masih muda sebagai motor gerakan transformasi didasarkan atas argumen bahwa pengurus partai yang tua sebagian besar dinilai masih ingin mempertahankan status quo demi kekuasaan yang lebih panjang.

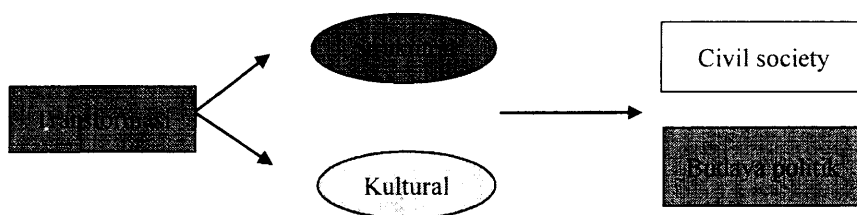
Transformasi politik di satu sisi adalah soal struktural, sebagaimana tujuan partai politik untuk mencapai kekuasaan, membangun sistem politik, dan bagaimana para pelaku politik mampu menggerakannya. Selebihnya transformasi politik secara kultural menjadi suatu yang absah, yaitu bagaimana menggerakkan partai politik untuk menjalankan fungsi-fungsinya bagi masyarakat, setidaknya, para pengikutnya, untuk menciptakan suatu budaya politik yang egalitarian, berdasarkan komitmen pembaharuan.⁹

Kedua sisi itulah yang melingkupi kaum muda dalam realitas politik dalam melakukan transformasi politik. Secara struktural (dalam pemahaman ini), jauh lebih memungkinkan untuk mampu digerakkan oleh kaum muda jika mengambil posisi peran sebagai praktisi politik dalam struktur partai politik, untuk menggerakkan kelembagaan partai politik secara institusional. Menggerakkan roda organisasi untuk melakukan reproduksi mekanis atas suatu peristiwa politik, bukan untuk pencapaian

⁹ Armin mustamin toputiri, *Pemuda di tengah realitas politik, instrumen pengabsah atau instrumen perubah?*, Badko HMI PHBI dan DPD KNPI Sulsel 2004

tujuan kekuasaan semata, tetapi menggerakkan fungsi-fungsinya untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan politik, serta memanfaatkan partai politik sebagai sarana pengatur konflik.

Sama artinya jika kaum muda mengambil posisi untuk melakukan transformasi politik secara kultural, dengan melihatnya bahwa kerja-kerja politik bukanlah urusan teknis yang mekanistik, tetapi pekerjaan intelektual. Yaitu menggerakkan tujuan perubahan berdasarkan pergulatan dan dialektika yang intens dilakukannya antara persepsi dirinya dengan bagaimana memandang suatu peristiwa politik, kaitannya dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu bangunan negara. Dengan itu, bentuk perubahan yang dilakukannya adalah merupakan pergulatan dirinya dengan persoalan dengan melibatkan tanggungjawab sosialnya dan integritas.



Cita-cita ideal yang diharapkan atas dua pola pendekatan transformasi politik itu, adalah terbangunnya budaya politik (*cultur politic*) dan masyarakat madani (*civil society*), yaitu menggerakkan keadaan sebagaimana mestinya, mempertimbangkan kemanfaatannya, serta memberi perspektif terhadap nilai yang sedang dianut ditengah masyarakat sebagai budaya politik dan mengartikulasikannya dalam sistem politik, untuk selanjutnya bermuara kembali menjadi budaya politik, dan selanjutnya. Itu artinya bahwa, bagi kaum muda yang akan melakukan transformasi politik, bukanlah suatu tanggungjawab yang bebas nilai, tetapi memiliki seperangkat nilai yang menjadi referensi pergerakannya, serta memperjelas posisi gerakannya, maupun untuk memben-tangkan visi ideal yang menjangkau ke depan atas cita-cita yang hendak dicapainya.

Pemaknaan atas pola pergerakan yang sedemikian itu, referensi nilai adalah unsur konstitutif yang menentukan watak dan kepribadian, karena memerlukan kejujuran dan keikhlasan untuk berani menjauhkan unsur-unsur subjektif bagi kepentingan diri semata, tetapi berikhtiar pada objektivitas atas suatu perangkat nilai untuk tetap setia pada ide dasar dan cita-cita perjuangan yang telah digariskan sebelumnya, dan jauh lebih mengedepankan tujuan jangka panjang dan untuk tujuan kemaslahatan orang banyak. Pada saat adanya kepentingan dalam suatu tanggungjawab, pada saat itu jugalah objektivitas memerlukan ujian sebagai pertaruhan integritas terhadap setiap diri. Suatu yang pada dasarnya memang semakin

paradoksal sekali sifatnya, karena menjadi suatu yang sejak mula adanya politik dan partai politik itu sendiri

Pada area mana saja transformasi perlu dilakukan?

Seperti telah disebutkan pada paparan selanjutnya, transformasi dapat dilakukan pada beberapa arena yang memungkinkan untuk dilakukan transformasi. Secara struktural transformasi dapat dilakukan pada pucuk pimpinan partai politik yang dianggap tidak mencerminkan pemimpin yang modern. Transformasi dilakukan pada tipe kepemimpinan yang kharismatik yang kemudian berubah menuju tipe kepemimpinan yang lebih rasional, cair, adaptif. Perlu ada perubahan dari tipe kepemimpinan yang berjuang untuk mempertahankan partai menjadi pemimpin dengan kriteria keprofesionalan. Semangat jaman yang ditandai dengan kemajuan konvergensi teknologi informasi membutuhkan tipe kepemimpinan yang lebih rasional dan santun. Orang bijak mengatakan bahwa kemajuan bangsa pada saat ini tidak lagi ditentukan oleh sosok atau tokoh yang luar biasa, melainkan oleh mimpi atau visi yang luar biasa disertai kerja detail yang luar biasa. Mimpi dan kerja detail yang luar biasa itu merupakan ideologi universal yang bisa melahirkan pesona material dan spiritual yang amat dahsyat.¹⁰

Kondisi parpol pada saat ini banyak yang *fatigue* atau kehabisan tenaga untuk menjalankan perannya, sehingga langkahnya sering menempuh jalan pintas dan jauh dari usaha mencerdaskan rakyat. Untuk itulah diperlukan transformasi politik dengan segera. Transformasi ini sesuai dengan ciri-ciri utama politik modern yang dirumuskan oleh Samuel P. Huntington. Ciri pertama adalah rasionalisasi dari otoritas. Yakni penggantian sejumlah otoritas politik tradisional yang tidak sesuai dengan semangat jaman. Dimana otoritas politik tradisional ini sering menjelma menjadi kultus buta, mengeksploitasi politik sektarian yang picik, sulit berbagi dan anti toleransi. Kedua; pengembangan infrastruktur dan suprastruktur untuk merevitalisasi program parpol. Infrastruktur lebih terarah kepada melengkapi perangkat keras, sedangkan suprastruktur kepada merevitalisasi spiritualitas partai. Ketiga; menggenjot partisipasi rakyat luas melalui pengembangan kelembagaan. Seperti asosiasi-asosiasi kepentingan untuk mengorganisasikan partisipasi tersebut kedalam strategi besar.

Ciri ketiga inilah yang sangat urgent, dimana kondisi struktural partai yang hanya mengakomodir sedikit kader untuk menduduki kepengurusan partai harus dikembangkan melalui pembentukan lembaga-lembaga fungsional partai. Sehingga menjadi proses pemberdayaan rakyat melalui pendekatan *societal learning concept* (konsep masyarakat belajar).

Peran penting partai politik dalam mempengaruhi terciptanya pemerintahan yang demokratis dan akuntabel

Demokrasi sering didefinisikan sebagai seperangkat proses ataupun institusionalisasi pemerintahan, tetapi masyarakat jarang berhenti berpikir apa yang

10 Hemat Dwi Nuryanto, *Marketing Parpol*, Kontan 27 Desember 2007

membuat institusi menjadi demokratis. Banyak parameter yang bisa digunakan untuk menilai apakah sebuah pemerintahan telah demokratis dan akuntabel. Berbagai parameter tersebut diantaranya adalah masalah partisipasi, autorisasi, representasi, akuntabilitas, transparansi, responsivitas, solidaritas. Setiap parameter tersebut mempunyai syarat serta seperangkat aturan untuk menuju sebuah pemerintahan yang demokratis. Secara singkat berbagai parameter dengan persyaratannya tersebut dapat diuraikan dalam sebuah diagram berikut ini:

Tabel parameter demokratisnya sebuah pemerintahan

Parameter	Persyaratan	Seperangkat alat untuk merealisasikan
Partisipasi	Hak untuk berpartisipasi, kapasitas/sumberdaya untuk berpartisipasi, agen untuk berpartisipasi, budaya untuk berpartisipasi	Sistem hal sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial, pemilihan umum, partai, NGO, pendidikan warganegara
Autorisasi	Validasi konstitusi, pilihan program, kontrol terhadap pemilu	pemilu yang fair dan bebas,
Representasi	Representasi dalam legislasi, keterwakilan setiap elemen masyarakat	Sistem kepartaian dan pemilu, hukum yang anti diskriminasi, kebijakan bebas bertindak
Akuntabilitas	kejelasan akuntabilitas, hukum, keuangan, politik, integritas penegak hukum,	Rule of law, pembagian kekuasaan, independen audit, standar penguatan hukum
Transparansi	Pemerintah terbuka terhadap legislatif dan pengawasan publik	media independen, kebebasan informasi, legislasi
Responsivitas	keseriusan pemerintah	Konsultasi publik

	dalam memformulasi dan mengimplementasi kebijakan dengan cepat berbagai persoalan masyarakat	yang sistematis dan prosedural
Solidaritas	toleransi, mensupport perjuangan demokrasi	pendidikan HAM dan civil, Hukum.

Sumber: IDEA Internasional

Dari setiap parameter yang mengindikasikan pemerintahan berjalan dengan demokratis tersebut, ada beberapa parameter yang menuntut hadirnya peran partai politik sebagai alat ataupun sarana untuk mewujudkan aspek-aspek dari sebuah pemerintahan yang dikatakan demokratis. Dari aspek yang pertama misalnya, partisipasi yang baik bagi warga negara terhadap semua proses yang dilakukan oleh pemerintah menuntut hadirnya partai politik dan pemilihan umum. Hasil Pemilihan umum yang bagus berkaitan juga dengan sebuah sistem kepartaian yang cocok Di sebuah negara. Partisipasi warga dalam proses demokrasi prosedural semacam pemilihan umum akan lebih berarti dan dalam maknanya apabila partai politik yang ada mampu menjalankan fungsi dan perannya dengan baik.

Jika fungsi pendidikan politik, mobilisasi warga, seleksi kandidat yang terbuka mampu dilakukan oleh partai politik dengan bagus, maka pelaksanaan pemilu menjadi lebih efektif dan efisien serta produk yang dihasilkan dari pemilu juga bisa dinilai lebih berbobot. Pendidikan politik yang bagus dari partai politik akan menghasilkan warga negara yang mengerti benar bagaimana harus melaksanakan perannya. Dapat dianalisa bahwa ketika warga mendapatkan pendidikan yang baik, maka dalam menjatuhkan pilihan terhadap wakil rakyat ataupun partai politik dalam pemilu akan menjatuhkan pilihan terhadap calon wakil rakyat yang mempunyai visi misi, orientasi, kabilita dan akuntabilitas yang bisa diandalkan.

Bisa dibayangkan apabila pendidikan politik tidak berjalan dengan baik, maka masyarakat hanya akan memilih wakil rakyat yang populer tanpa memperhatikan aspek penting lainnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Disinilah letak peran penting partai politik sebagai instrumen yang bertanggungjawab untuk melakukan perannya memberikan pendidikan politik. Untuk itulah tidak berlebihan jika agenda transformasi partai politik yang tidak mampu menjalankan perannya dengan baik perlu segera dilakukan mengingat efek yang ditimbulkan dari tidak bekerjanya partai secara efektif sangatlah buruk. Aspek dari pemerintahan yang demokratis menjadi kurang bermakna ketika partai politik tidak mempunyai kapasitas mengembangkan fungsi dan perannya. Aspek partisipasi menjadi kurang berjalan dengan baik sehingga makna pemerintahan yang demokratis juga berkurang nilainya.

Sistem kepartaian juga menjadi salah satu faktor penting dari berjalannya partisipasi dai warga negara. Sistem kepartaian yang memberikan kesempatan lebar bagi warga negara untuk menjatuhkan pilihan terhadap salah satu kandidat tentu menjadi sangat berarti. Jika sistem kepartaian hanya memberikan peluang sempit

terhadap pilihan-pilihan kandidat, makna partisipasi juga menjadi berkurang pula mengingat pilihan yang ada terbatas atau sengaja dibatasi. Sistem *Hegemonic party system* tentu akan lebih membatasi partisipasi warga dibandingkan apabila menggunakan sistem *pluralis moderat*.

Aspek yang kedua yakni Autorisasi juga membutuhkan adanya pemilihan umum yang bebas dan fair untuk mencapainya. Dalam kondisi seperti ini, partai politik sebagai subyek dalam pelaksanaan pemilu dituntut untuk bisa bersaing dengan fair tanpa ada kecurangan yang akan menciderai substansi dari pelaksanaan pemilu. Untuk menjadi partai politik yang tidak berupaya dengan segala cara memperoleh dukungan konstituen tentu juga tidak mudah. Realitas di Indonesia menunjukkan bahwa partai politik masih berkompetisi dan saling menjatuhkan untuk memperoleh suara yang signifikan. Belum banyak partai, jika terlalu ekstrim menyebut tidak ada, yang mampu menjadi partai modern yang mengutamakan program sebagai tawaran menarik bagi konstituen. Dengan kata lain, konstituenlah yang mencari partai terbaik, bukan sebaliknya partai politik yang harus mencari konstituen dengan cara apapun.

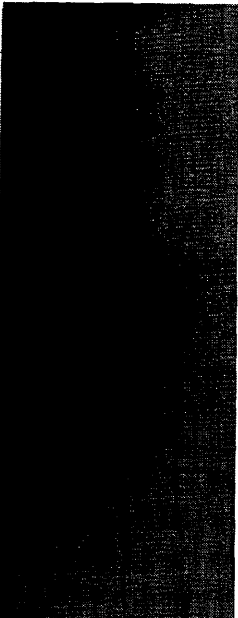
Proses untuk menciptakan partai politik yang modern tersebut dapat dimulai dengan melakukan transformasi partai politik dari berbagai partai yang mempunyai potensi untuk menjadi partai politik modern ditandai dengan beberapa ciri yang mengindikasikan adanya aspek-aspek partai modern. Jika hal ini bisa terwujud, maka autorisasi yang diharapkan bisa berjalan akan dapat dipenuhi dengan relatif lebih mudah. Aspek dari demokratisnya pemerintahan yang ketiga yakni representasi juga membutuhkan sarana untuk mencapainya. Salah satu sarana yang digunakan untuk mencapainya adalah sistem kepartaian dan pemilu.

Terbukanya konsep keterwakilan juga merupakan salah satu indikasi bahwa pemerintahan berjalan dengan relatif demokratis. Representasi dari banyak elemen di masyarakat, yang termanifestasi dengan beragamnya ideologi baik di lembaga eksekutif ataupun legislatif akan memberikan peluang lebih besar terapresiasinya aspirasi masyarakat. Sistem kepartaian dan partai politik itu sendiri menjadi subyek penting bagi terciptanya representasi yang mewakili banyak kepentingan masyarakat. Tipe sistem kepartaian yang pluralis tentu akan membuka peluang representasi yang lebih baik dibandingkan dengan sistem kepartaian tunggal. Meskipun begitu untuk mewujudkan sistem kepartaian yang representatif diperlukan upaya yang melibatkan banyak pihak, terutama dari partai politik, penentu kebijakan serta anggota dewan selaku pihak yang mempunyai kewenangan untuk membuat UU.

Setelah aspek ketiga tersebut, yang perlu diperhatikan adalah aspek akuntabilitas pemerintahan. Sejauhmana pemerintah akuntabel terhadap rakyatnya dapat diukur dengan beberapa parameter berikut.

Parameter pemerintahan yang akuntabel terhadap rakyat

Parameter	+	-
Seberapa jauh pemerintah mampu mengorganisasi dan menyelesaikan berbagai		

persoalan yang dihadapi rakyat	
Seberapa banyak tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah	
Seberapa efektif dan terbuka kontrol pemimpin eksekutif dan menteri terhadap staff administratif mereka	
Seberapa luas dan efektif kekuatan lembaga legislatif dalam melakukan inisiatif, pengawasan serta pengembangan proses legislasi	
Seberapa tepat prosedur untuk menyetujui serta mensupervisi perpajakan dan pengeluaran publik	
Seberapa komprehesif dan efektif proses legislasi memberikan akses pada warga negara untuk mengakses informasi tentang pemerintahan	

Sumber: IDEA Internasional

Semakin banyak sisi positif (yang mengindikasikan bahwa pemerintah memang akuntabel terhadap rakyatnya) dari parameter tersebut, maka semakin baik manajemen pemerintahan yang dilakukan oleh pemimpin eksekutif. Tingkat akuntabilitas yang tinggi dari pemerintah membuktikan bahwa lembaga eksekutif berisi orang-orang yang mempunyai kapasitas mencukupi untuk memimpin negeri ini. Untuk menghasilkan orang-orang yang mempunyai kapasitas mencukupi, tidaklah melalui proses yang instan. Mekanisme pemilu yang baik, pendidikan politik, serta pendidikan yang memadai bagi bagi calon-calon pemimpin eksekutif merupakan beberapa langkah yang harus ditempuh.

Lalu dimanakah peran partai politik dalam upaya penciptaan pemerintahan yang akuntabel ini? Jika diruntut dari proses penciptaan pemerintahan yang akuntabel, maka peran partai politik dapat dimulai dari proses pendidikan kader yang baik sebagai upaya penciptaan calon pemimpin eksekutif yang mampu memimpin negeri ini dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan rakyat Indonesia. Setelah pendidikan kader yang baik dapat dilakukan, maka dalam pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih calon pemimpin eksekutif, tiap parpol harus menjunjung tinggi mekanisme pemilu yang jujur dan adil. sehingga produk yang dihasilkan memang benar-benar mencerminkan aspirasi dari masyarakat.

Setelah proses pemilihan umum selesai dilakukan, partai politik yang mempunyai kader sebagai pemimpin eksekutif haruslah terus mengawal setiap kebijakan yang diambil sehingga tingkat akuntabilitas yang dilakukan oleh eksekutif tetap terjaga dengan baik. Demikian pula dengan partai politik yang tidak mempunyai kader dalam pemerintahan. Melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif, partai politik yang menjadi oposisi pemerintah harus tetap mengawasi serta memperingatkan apabila

pemerintah tidak melakukan tanggungjawab dengan benar. Namun proses pengawasan dan peringatan yang dilakukan ini tidak boleh dipelintir dan dijadikan manuver untuk menjatuhkan pemerintah dengan mudah. Hubungan antara eksekutif dan legislatif harus berada pada koridor yang tepat.

Bentuk peran partai politik yang bisa dikategorikan ikut andil dalam penciptaan pemerintahan yang akuntabel adalah mencoba untuk menghimpun, menyerap dan mencoba untuk membicarakannya dengan eksekutif setiap aspirasi dari masyarakat. Pemerintahan yang akuntabel dapat dinilai dari setiap langkahnya dalam memproses setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang disampaikan melalui wakil-wakil di legislatif. Jika partai tersebut merupakan partai politik pendukung pemerintah, maka prosesnya akan menjadi lebih mudah lagi mengingat pemimpin eksekutif merupakan kader yang mewakili eksistensi partai politik di lembaga eksekutif.

Kembali pada aspek-aspek yang menunjukkan bahwa sebuah pemerintahan berjalan dengan demokratis, yakni aspek transparansi. Peran partai politik dapat dinilai dari setiap langkah yang dilakukan oleh anggota legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, maka keterbukaan untuk diawasi oleh legislatif merupakan salah satu prasyarat yang harus dilakukan agar pemerintahan dapat berjalan dengan demokratis.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa peran partai politik dalam penciptaan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel sangatlah besar. Dengan fakta seperti ini maka kebutuhan untuk segera melakukan transformasi partai politik haruslah segera dilakukan. Reformasi partai politik terbukti belum mampu menjadikan partai politik menjadi modern dan ideal bagi Indonesia, sedangkan pemerintahan yang demokratis (dalam artian substantif) juga masih belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ketika mimpi mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel adalah impian setiap warga negara, maka transformasi menjadi jawaban untuk mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Nuryanto, *Hemat Marketing Parpol*, Kontan 27 Desember 2007
IDEA, *Democracy Assesment: The basics of the internasional assesment framework*, 2002
- Imawan, Riswanda *Diktat kuliah sistem kepartaian dan pemilu 2002*
- Mustamin toputiri, *Armin Pemuda di tengah realitas politik. instrumen pengabsah atau instrumen perubah?*, Badko HMI PHBI dan DPD KNPI Sulsel 2004
- Noris, Pippa *Building political parties: Reforming legal regulation and internal rules*, Harvard University Cambridge 2005